

Hari/Tanggal : Jumat/ 09 April 2021

Waktu : 09.00 WITA- Selesai

Tempat : Fakultas Ilmu Budaya (Via Zoom)

PERJUDIAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 1967-1974



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Oleh:

FITRI RAMDAYANI MAHMUD

Nomor Pokok: F811 16 303

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

SKRIPSI

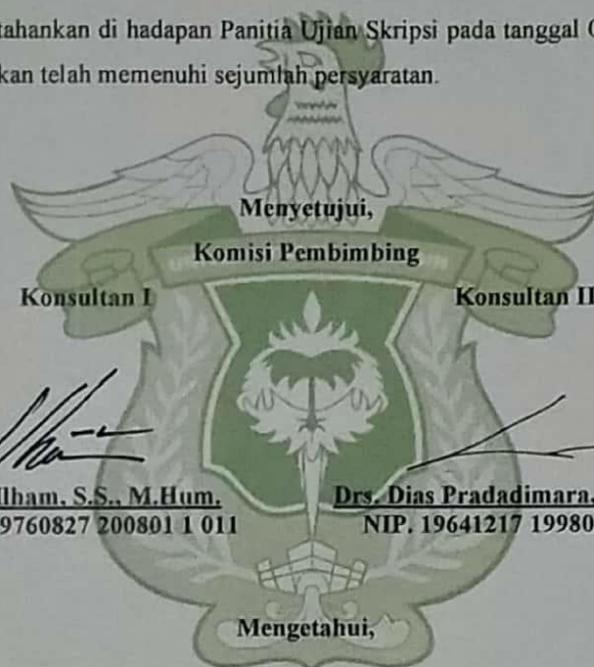
PERJUDIAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 1967-1974

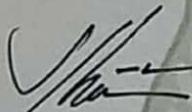
Disusun dan diajukan oleh:

FITRI RAMDAYANI MAHMUD

F811 16 303

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 09 April 2021 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.




Dr. Ilham, S.S., M.Hum.
NIP. 19760827 200801 1 011

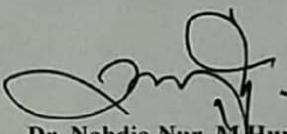

Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.
NIP. 19641217 199803 1 001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**



**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**


Dr. Nahdia Nur, M.Hum.
NIP. 19650321 199803 2 001

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Jumat, 09 April 2021, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

PERJUDIAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 1967-1974

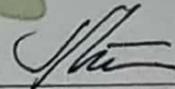
Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 09 April 2021



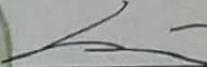
1. Dr. Ilham, S.S., M.Hum.

Ketua

: 

2. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S

Sekretaris

: 

3. Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A.

Penguji I

: 

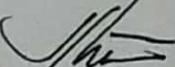
4. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum.

Penguji II

: _____

5. Dr. Ilham, S.S., M.Hum.

Konsultan I

: 

6. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S

Konsultan II

: 

PERNYATAAN KEASLIHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fitri Ramdayani Mahmud

NIM : F81116303

Jurusan/Program Studi : Ilmu Sejarah

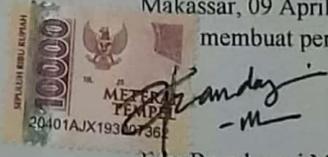
Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

“PERJUDIAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 1967-1974”

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau yang diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 5 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 09 April 2021
membuat pernyataan



Fitri Ramdayani Mahmud

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perjudian di Kota Makassar Tahun 1967-1974”** sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana dari Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini tentunya melalui proses yang cukup panjang hingga dapat sampai ke tangan pembaca saat ini. Proses awal yang cukup menguras waktu dan tenaga untuk penulisan skripsi ini yakni pencarian judul penelitian. Berbeda dengan jurusan-jurusan lainnya yang ada di Fakultas Ilmu Budaya ini, jurusan sejarah memiliki tantangan tersendiri untuk penentuan judul penelitian. Penulisan sejarah harus dilandasi oleh data primer atau arsip yang kuat untuk dapat dikembangkan, namun tak dapat dipungkiri bahwasanya arsip-arsip yang tersedia telah banyak diteliti dan digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sementara, untuk penulisan sejarah dibatasi oleh periode tahun tertentu sedangkan arsip- arsip untuk tahun tersebut tidak akan mengalami perubahan Kendala yang tak kalah menghambat dalam penyelesaian penelitian ini yakni situasi Pandemi COVID-19 yang membatasi gerak penulis dalam penelitian ini.

Skripsi ini tentunya tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik pihak yang secara langsung berperan dalam penyusunan skripsi ini maupun pihak yang berperan secara tidak langsung. Semua bantuan tersebut

merupakan ilmu yang luar biasa bagi penulis. Sungguhlah ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang kiranya dapat memberi manfaat untuk orang lain. Semoga skripsi ini juga dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Skripsi ini secara khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yakni **Bapak Mahmud** dan **Ibu Ummiati**, yang dengan sangat hebatnya dapat membawa anaknya ke perguruan tinggi hingga mendapatkan gelar sarjana. Perjuangan hidup yang luar biasa telah mereka lalui, tapi tak pernah gentar untuk membawa anak perempuan satu-satunya menuju cakrawala dunia. Penulis ingin berterima kasih sedalam-dalamnya atas segala keringat, air mata, dan perjuangan Bapak dan Ibu untuk menuntun penulis hingga berada di titik ini. Tak lupa pula penulis panjatkan terima kasih yang juga tak terhingga untuk kedua saudara penulis yakni **Akbar Mahmud** dan **Usman Mahmud** atas segala dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pun penulis utarakan kepada :

1. Dosen Pembimbing penulis yakni **Dr. Ilham, S.S.,M.Hum.** dan **Drs. Dias Pradadimara,M.A.,M.S.** yang telah memberikan masukan dan ilmu yang luar biasa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian penulis. Terima kasih telah menjadi sosok inspirasi penulis, terima kasih telah membuka wawasan penulis, terima kasih telah mengajarkan penulis menjadi orang yang berpegang teguh pada

pendirian, dan terima kasih atas segala ilmunya selama masa perkuliahan penulis.

2. Seluruh dosen Departemen Ilmu Sejarah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan, mulai dari **Dr. Nahdiah Nur, M.Hum.**, selaku ketua departemen dan **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag.**, selaku sekretaris departemen. Serta jajaran-jajaran dosen yakni **Alm. Prof. Dr. Abd. Rasyid Asba, M.A.**, dan **Alm. Margriet Mokka Lappia, S.S, M.S.**, **Dr. Bahar Akkase Teng, Lcp., M.Hum.**, **Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum.**, **Dr. Abd. Rahman Hamid, M.Si.**, **Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A.**, **Dr. Bambang Sulistyو Edi Purwanto, M.S.**, **Dr. Muslimin AR Effendy, M.A.**, **Nasihin, S.S., M.A.**, dan **A. Lili Evita, S.S., M.Hum.**
3. **Uddjie Usman Pati, S.Sos.**, selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Sejarah, yang telah membantu penulis dalam hal pengurusan berkas selama masa perkuliahan penulis.
4. Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan jajarannya terkhusus kepada staf pegawai administrasi yang telah membantu segala jenis pengurusan berkas penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh staf layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menemani dan membantu penulis selama masa penelitian terutama untuk **Kak Kasma, Kak Iccang, Kak Hasnah**, serta **Ibu Nila**.

6. Teman-teman seperjuangan Historian 2016, yang telah melalui berbagai macam kenangan bersama sepanjang masa perkuliahan penulis, ingatlah selalu kita pernah tertawa dan gila bersama di ruangan yang akan menjadi sejarah dalam kehidupan kita mulai dari ruangan 212, 324 serta MKU 225. Jadilah manusia yang memanusiaikan manusia dimanapun kalian berada nantinya. Salam sayang untuk kalian yakni **Eve, Siska, Intan Rifana, Ega, Kiki, Dayen, Dewi, Selvi, Sinar, Tati, Intan DWBP, Benazer, Jusni, Erni, Nisa, Alle, Allu, Madi, Rais, Hendra Arisal, Erwin S, Burhan, Arafah, Gutawa, Isman, Ammar, Zul, Fahrul, Akang, Alam.**
7. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan di Fakultas Ilmu Budaya yakni Amanagappa 2016 terima kasih untuk kebersamaannya. Terkhusus untuk kawan-kawan dalam kepanitian PPMB 2019 **Oci, Picca, Arista, Ade, Fajar, Atin, Nuril, Jaya, Nona, Eko, Yayat, Dian, Ikram, Danu, Faddal, Jeje, Yola, Enis, Pajo, Madi, Siska.**
8. Keluarga Besar HUMANIS KMFIB-UH, yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang luar biasa kepada penulis, serta telah menjadi rumah kedua bagi penulis selama berkuliah di Universitas Hasanuddin. Terkhusus untuk senior-senior yang telah membimbing penulis yakni **Kak Karim, Kak Apos, Kak Fatin, Kak Herman, Kak Ibnu, Kak Marwan, Kak Syahrul, Kak Dicky, Kak Enal, Kak Panjul, Kak Dharul, Kak Maman, Kak Entong, Kak Riska, Kak Mita, Kak Ani, Kak Yuli** serta semua yang tak bisa penulis sebutkan

satu-persatu. Juga kepada adik-adik **Fika, Alda, Darwan, Ismi, Mimi, Widya, Ramin** tetaplah berkarya.

9. Teman-teman KKN Atambua Gel. 102 Nusa Tenggara Timur, terima kasih untuk segala pengalaman yang telah kita lalui selama 1 bulan lebih, kalian luar biasa. Ini akan menjadi pengalaman yang teramat indah dalam hidup penulis. Terima kasih telah menjadi orang-orang hebat, serta teruslah menjadi hebat dalam perjalanan hidup kalian masing-masing. Terkhusus untuk kawan-kawan Posko 3 **Erick, Ekky, Ashar, Erna, Mirna, Atik, Masli, Ren** juga untuk **Dian, Oya, Feby, Bowo, Aldi, Adi, Wais, Cici, Thifa, Sofyan** serta **Alm. Winda**. Tak lupa teruntuk **Bapak Noer** sekeluarga yang telah menjadi orang tua bagi penulis selama ber-KKN, juga kepada **Bapak Genara, Mama Bertha, Bapak Arka, Mama Feni**, dan semua masyarakat Desa Kenebibi, NTT, serta untuk orang yang telah membawa kami ke tempat luar biasa ini yakni **Kak Gego Sallatu**, selaku supervisor terhebat kami.
10. Sahabat-sahabatku yang tersayang **Dian Febrianti, Febrianti**, serta **Siti Aulia S. Mansyur**, terima kasih untuk semuanya.
11. Ucapan terkhusus untuk sahabatku yang sudah seperti saudara bagi penulis. Sahabat-sahabat yang sangat berharga dalam perjalanan hidup penulis selama menempuh perkuliahan ini. Semua keluh kesah, tawa bahagia, tangis haru, pertengkaran, telah dilalui bersama. Terima Kasih tak terhingga penulis haturkan untuk segala kasih dan sayang yang kita rajut selama ini, harap penulis hanya satu berbahagialah selalu dalam

setiap mimpi yang akan kalian kejar, jangan pernah lupakan segala perjuangan kita hingga bisa menyentuh titik ini. Kalian hebat, kalian luar biasa, kasih sayang penulis teramat dalam untuk kalian **Evelyn Bonga Limbong, Nur Asiska, Rahmadi, Nasruddin, Muhammad Rais**, dan juga **Hendra**.

12. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada sosok terkasih **Emir Raufi** yang telah mengajarkan penulis melewati berbagai dinamika terkhusus selama masa kelembagaan penulis, tetaplah menjadi pribadi yang sederhana dan tulus.

Akhir kata, penulis sekali lagi menghaturkan terima kasih atas segala dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga apa yang ingin penulis sampaikan dalam penulisan ini dapat tersampaikan dan memberi manfaat bagi para pembacanya.

Makassar,

Fitri Ramdayani Mahmud
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Tinjauan Pustaka	10
1.7 Metode Peneltian.....	13
1.8 Sistematika Penulisan	15
BAB II MAKASSAR DALAM ARUS SEJARAH.....	17
2.1 Makassar Sebelum Kemerdekaan	18
2.2 Makassar Pasca Kemerdekaan Hingga Tahun 1960	20
2.3 Makassar Di Bawah Pemerintahan Muhammad Daeng Patompo	23
2.3.1 Rezim Orde Baru dan Pembangunan Kota Makassar	24
2.3.2 Kondisi Geografis dan Administratif Kota Makassar	25
2.3.3 Kondisi Ekonomi dan Penduduk Kota Makassar.....	30
2.3.4 Kebijakan-Kebijakan M. Dg. Patompo	31

BAB III PERJUDIAN <i>LOTERE TOTALISATOR</i> DI KOTA MAKASSAR	
TAHUN 1967 – 1969	38
3.1 Perkembangan Perjudian di Kota Makassar Sebelum Lotere	
Totalisator.....	39
3.2 Lahirnya Kebijakan <i>Lotere Totalisator</i> di Kota Makassar	44
3.3 Elemen-Elemen Dalam Perjudian <i>Lotere Totalisator</i>	48
3.3.1 Tata Cara Permainan	48
3.3.2 Penghasilan Pajak Lotere Totalisator	53
3.3.3 Pihak-Pihak Yang Telibat Dalam Permainan <i>Lotere Totalisator</i> .	56
3.4 Pro dan Kontra Penyelenggaraan <i>Lotere Totalisator</i> di Kota	
Makassar	67
BAB IV PERJUDIAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 1970-1974...	72
4.1 Perjudian <i>Casino</i> dan Erek-Erek di Kota Makassar Pasca Lotto.....	73
4.2 Perjudian Hazard di Kota Makassar Tahun 1970-1973	85
4.3 Munculnya Peraturan Penertiban Terhadap Perjudian Tahun 1974	90
4.4 Perjudian di Kota Makassar Pasca <i>Lotere Totalisator</i> 1970-1974	93
BAB V PENUTUP.....	95
5.1 Kesimpulan	95
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Penduduk Kotamadya Ujung Padang.....	31
Tabel 3.1 Rekap Penjualan Hasil Lotto.....	55
Tabel 3.2 Daftar Nama Agen Periode Ke-VIII (April 1968).....	59
Tabel 4.1 Laporan Omzet Penjualn Erek-Erek	84
Tabel 4.2 Susunan Team Pengawas dan Peneliti Data Omzet Permainan Hazard Kotamadya Makassar	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kotamadya Ujung Pandang Setelah diperluas	28
Gambar 2.2 Penjelasan Program 3K	34
Gambar 3.1 Kupon Lotto	49
Gambar 3.2 Contoh Pengisian Kupon Lotto	50
Gambar 3.3 Salah Satu Lokasi Agen Lotto.....	62
Gambar 3.4 Lokasi Pemutaran Lotto	63

ABSTRAK

Fitri Ramdayani Mahmud (F81116303), dengan judul “Perjudian di Kota Makassar Tahun 1967-1974”, dibimbing oleh Dr. Ilham, S.S.,M.Hum dan Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang berfokus pada sejarah sosial yang membahas tentang kompilasi antara satu kebijakan pemerintah dengan aktivitas masyarakat yakni kegiatan Perjudian di Kota Makassar Tahun 1967-1974. Metode yang digunakan untuk menjabarkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah dengan tahapan pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perizinan untuk kegiatan perjudian yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah rentang tahun 1967-1974 merupakan langkah pengumpulan dana inkonvensional untuk pembangunan. Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Sosial RI memberikan perizinan terhadap kegiatan perjudian *Lotere Totalisator* di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kota Makassar pada tahun 1967. Meski pada tahun 1969 kebijakan pusat tentang penyelenggaraan Lotto telah berakhir di Kota Makassar, namun hal tersebut tidak pula menghentikan berbagai kegiatan perjudian. Bahkan, awal tahun 1970-an pemerintah daerah Kota Makassar mengeluarkan kebijakan untuk perizinan kegiatan perjudian dengan format yang berbeda. Izin tersebut diberikan kepada beberapa pengusaha besar yang tertarik berbisnis dibidang perjudian. Adapun beberapa format perjudian yang diberikan izin yaitu *casino*, *erek-erek* dan *hazard*.

Kata Kunci: Kota Makassar, Perjudian, Lotto, Dana Pembangunan

ABSTRACT

Fitri Ramdayani Mahmud (F81116303), with the title "Gambling in Makassar City 1967-1974", supervised by Dr. Ilham, S.S., M.Hum and Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.

This research is about social history which discusses the compilation of one government policy with community activities, called gambling activities in Makassar City in 1967-1974. The method that the researcher used to describe the problems in this research is the historical method with the stages of source collection, verification, interpretation and historiography.

The results showed that the licensing policy for gambling activities issued by the central and local governments between in 1967-1974 was an unconventional fundraising step for development. The central government, in this case the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, gave licenses for *Totalizer Lottery* gambling activities in several regions in Indonesia, including in Makassar City in 1967. Although in 1969 the central government policy on holding Lotto had ended in Makassar City, this did not stop various gambling activities. In fact, in the early of 1970s the local government of Makassar City issued a policy for licensing gambling activities with a different format. The license was given to several large businessmen who were interested in doing business in the gambling sector. There are several gambling formats that are licensed, called *casino*, *erek* and *hazard*.

Keywords: Makassar City, Gambling, Lotto, Development Funds

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makassar telah melintasi waktu yang panjang dalam pengalaman modernitas. Di tahap awal pembangunan kota modern ditandai dengan pembangunan aspek fisik yang berbasis perkembangan ekonomi. Pantai Losari, gedung pertemuan, hotel, bioskop, pasar malam, dan lain-lain adalah ruang penting modernitas dan hiburan perkotaan tahun 1950-an yang dibangun dan dikembangkan.¹ Namun, di lain sisi ada beberapa hal yang terus menjadi bagian dari perkembangan kota modern yakni meluasnya kegiatan-kegiatan penduduk kota yang sering disebut sebagai permasalahan-permasalahan kota modern. Salah satunya adalah aktivitas perjudian yang juga terus berkembang mengiringi perkembangan zaman.

Perjudian itu sendiri merupakan permainan yang dikenal diseluruh dunia dengan prinsip untung-untungan. Begitupun di Indonesia, masalah judi ini klasik dan mendarah daging di masyarakat Indonesia. Perkembangan perjudian juga berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Pada mulanya kegiatan-kegiatan perjudian di atas merupakan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan upacara atau adat kepercayaan masyarakat. Namun, seiring perkembangan kehidupan manusia, hal tersebut

¹ Dias pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay. *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an: Pengantar Historiografi*. (Yogyakarta: PT Kanisius, 2014). hlm. 82.

dijadikan sebagai ajang taruhan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah.

Menurut Kartono perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.² Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Judi atau Perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.³ Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.⁴

Dalam tafsir kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.⁵ Maka, secara sederhana penulis mengartikan bahwa judi merupakan suatu

² Kartini Kartono. *Patologi Sosial Jilid 1*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hlm. 56.

³ Poerwardaminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). hlm. 419.

⁴ *Loc. Cit.*

⁵ Dali Mutiara. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962). hlm 220.

kegiatan ataupun permainan yang dilakukan beberapa orang yang bersepakat dengan mempertaruhkan sebuah nilai dengan unsur keberuntungan.

Belum diketahui secara pasti bagaimana munculnya perjudian di Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu, perjudian awalnya berkembang di daerah pesisir dan kota-kota pelabuhan sebagai wilayah yang bersentuhan lebih awal dengan budaya baru itu, kemudian berkembang di kerajaan-kerajaan. Jenis perjudian yang berkembang pada waktu itu adalah taruhan adu jago. Lalu, pergeseran beberapa kegiatan adat masyarakat juga banyak mengarah kepada ajang taruhan atau perjudian misalnya adat di daerah Jawa Timur tepatnya di Pulau Madura terkenal dengan Karapan Sapi sebagai acara pasca panen menjadi ajang adu kekuatan dengan mempertaruhkan nilai (misalnya uang), Pulau Sumbawa dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi dan pulau Bali dengan adu ayam jago. Kemudian, perkembangan varian perjudian juga tidak terlepas dari pengaruh berbagai macam budaya luar yang masuk baik itu Eropa dan terutama China.

Pengaruh orang-orang China pada kegiatan perjudian di Indonesia cukuplah besar, karena diketahui sejak masa VOC pedagang-pedagang Tionghoa memiliki peranan yang penting dalam perdagangan di Hindia Belanda. Sehingga banyak warga Tionghoa yang memilih menetap di negeri Hindia Belanda ini. Masyarakat Tionghoa menyukai kegiatan hiburan untuk kesenangan ataupun hura-hura. Beragam pertunjukan sering dilakukan oleh warga Tionghoa, dan kegiatan perjudian tak pernah lepas dari pertunjukan-pertunjukan tersebut. Sebagai contoh, kontes adu silat atau *Battement-Spill* yang dilakukan oleh pemerintah VOC di

Batavia pada abad ke 18, kegiatan perjudian menjadi salah satu sajian dalam festival tersebut.⁶

Perjudian dianggap sebagai salah satu hiburan yang sangat digemari banyak kalangan. Di Surabaya misalnya, pada zaman kolonial berjudi merupakan salah satu hiburan yang sangat disukai yang ditandai dengan pembangunan gedung yang digunakan untuk berkumpul kelompok-kelompok orang kaya sebagai tempat hiburan dan juga berjudi yang diberi nama *societiet* berdiri pada 1845. Di gedung ini orang-orang yang mempunyai banyak uang dan orang-orang asing berkumpul untuk melakukan permainan judi.⁷

Pada dasarnya kegiatan perjudian melibatkan banyak elemen, mulai dari pelaku, pihak penyelenggara, lokasi pelaksanaan, jenis permainan, hingga pada kepercayaan-kepercayaan tertentu dalam melakukan permainan. Pelaku perjudian atau orang yang melakukan kegiatan perjudian juga berasal dari golongan-golongan yang beragam, mulai dari masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah hingga pada masyarakat golongan atas ataupun etnis tertentu. Dengan faktor yang berbeda, misalnya untuk mengubah keadaan ekonomi bagi masyarakat menengah, sementara bagi kalangan atas merupakan sebuah hiburan pertarungan gengsi sosial. Untuk lokasi perjudian sendiri juga beragam ada yang dilakukan dalam ruangan yang lebih identik dengan perjudian *casino*, luar ruangan yang

⁶ Wildan Sena Utama. "Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Tionghoa di Batavia 1900an-1930an". *Jurnal Lembaran Sejarah*, Universitas Gadjah Mada.

⁷ Rina Krisnawati. "Lotere Totalisator di Surabaya Tahun 1968-1969". *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Airlangga, 2010). hlm. 2.

biasanya dilakukan pada kegiatan-kegiatan festival seperti *stand-stand* yang dibangun untuk berbagai ajang pertarungan, maupun yang dilakukan tanpa tatap muka seperti permainan *lotere* yang hanya dilakukan dengan membeli lot-lot *lotere*. Mengenai jenis permainan, berbagai pengaruh luar yang masuk menjadi salah satu faktor beragamnya jenis permainan seperti permainan dadu, permainan kartu, permainan menggunakan mesin hingga permainan undian atau dikenal dengan *lotere*.

Sementara, dalam hal kepercayaan banyak hal-hal non-rasional yang mereka yakini dalam menentukan kemenangan misalnya beberapa penjudi yang memilih pergi ke dukun, ketempat keramat atau kuburan untuk mendapat petunjuk mengenai hasil daripada perjudian yang akan dia lakukan. Hal tersebut memicu berbagai stigma dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perjudian dianggap sebagai hal yang negatif. Lalu, pada masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan tahun 1965 yang menyatakan kegiatan perjudian merupakan kegiatan yang dilarang karena dapat merusak moral bangsa dan masuk dalam kategori subversi.

Namun, berbeda dengan masa Orde Lama, pada awal pemerintahan Orde Baru muncul kebijakan yang mengizinkan adanya perjudian. Kebijakan ini dilakukan untuk menambah pendapatan daerah akibat negara yang mengalami devisa sebagai dampak kemerosotan ekonomi rentang tahun 1960-1965. Kemerosotan keuangan daerah berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, sehingga secara tidak langsung, mendorong daerah-daerah untuk menambah pendapatan sendiri. Salah satu hal yang dilakukan daerah

untuk mengatasi krisis keuangan tersebut adalah melakukan legalisasi judi.⁸ Menelisik dari semboyan utama pada masa pemerintah Orde Baru yakni “pembangunan”, maka perizinan perjudian ini menjadi salah satu cara yang diambil beberapa daerah guna memenuhi perkembangan pembangunan daerahnya.

Kebijakan ini kemudian pertama kali diterapkan pada tahun 1966 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Beliau memberikan izin terhadap perjudian demi menunjang pembangunan daerah dengan melegalkan *Lotere Totalisator* dan *National Loterey*. Lotto dan Nalo di Jakarta ini menghasilkan secara konkret berpuluh-puluh bangunan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, halte-halte dan stasiun-stasiun bus, perbaikan serta pelebaran jalan-jalan kota.⁹ Anggaran pembangunan DKI Jakarta meningkat dari Rp. 66 Juta melonjak tajam lebih dari Rp. 89 Miliar dalam tempo 10 tahun sejak dilegalkannya perjudian.¹⁰

Hal serupa dilakukan juga oleh Daerah Surabaya yang mengalami kekurangan anggaran dalam pembangunan. Maka, Gubernur Jawa Timur waktu itu menerima pelegalan perjudian, dengan nama Lotto Jatim yang meliputi semua daerah Jawa Timur. Pelaksanaan lotto itu terutama diperuntukkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan juga perbaikan infrastruktur kota. Selain peruntukan pembangunan, pelegalan perjudian Lotto di Surabaya juga diperuntukkan untuk dana penyelenggaraan PON VII Surabaya yakni dengan menyelenggarakan Lotto PON.

⁸ *Ibid.* hlm. 4.

⁹ Kartono, *Op. Cit.*, hlm 70.

¹⁰ Krisnawati, *Loc. Cit.*

Makassar juga mengalami kendala klasik dalam hal anggaran untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunannya. Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana besar rehabilitasi dan pembangunan sebagaimana telah dikemukakan dalam “Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Makassar tahun 1965-1970” dengan tujuan menjadikan Kota Makassar sebagai suatu Kota Dagang, Kota Budaya dan Kota Industri.¹¹ Maka, untuk menangani kendala tersebut Makassar melihat kesuksesan yang dicapai oleh pemerintah DKI Jakarta. Walikota Makassar H..M Dg.Patompo tahun 1968 akhirnya mengajukan permohonan pelaksanaan Lotto di Kota Makassar. Hal tersebut kemudian diindahkan pemerintah pusat dengan mengeluarkan Surat Ketetapan tentang pembentukan Lotto Indonesia cabang Makassar yang diberi nama Lotto Makassar. Adapun isinya berupa pemberian izin untuk menyelenggarakan usaha Lotto, yang mana hasilnya akan digunakan untuk membangun daerah kotamadya Makassar serta pembangunan rumah-rumah sakit, balai pemberantasan penyakit kusata, dan gedung-gedung sekolah.¹²

Namun, setelah berakhirnya masa penyelenggaraan Lotto kisaran tahun 1970-an kegiatan perjudian di Kota Makassar tidak pula hilang dari kehidupan masyarakat. Bahkan, setelah berkembangnya dunia hiburan malam rentang tahun

¹¹ Fitri Handayani. “Legalisasi Lotto di Makassar, 1967-1969”. *Pattinngalloang: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kesenjaraan*, Vol.6 No. 2. 2019. hlm. 42.

¹² Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang Volume I (1926-1988). “an.DPRD Kotamadya Makassar: Surat Keputusan tanggal 26 Januari 1968 tentang penyelenggaraan Lotere Totalisator (Lotto)”. (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015). No.Reg. 1945.

1970-1980-an juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kegiatan perjudian di Kota Makassar. Walaupun kegiatan perjudian sejak tahun 1974 telah mendapatkan larangan dengan dikeluarkannya UU tentang penertiban perjudian, tetapi bentuk-bentuk perjudian liar dan illegal tetap berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dari berbagai penjabaran diatas penulis tertarik memilih penelitian ini dikarenakan kebijakan yang diambil untuk penanganan masalah keuangan di beberapa daerah di Indonesia ini merupakan kompilasi dari kebiasaan masyarakat dan kebutuhan pemerintahan. Dapat dilihat bahwa kegiatan perjudian yang marak di kalangan masyarakat Indonesia berakar dari kebiasaan masa lalu yakni pada masa kerajaan yaitu kegiatan sabungan. Meskipun dalam perkembangannya tidak lepas dari sentuhan budaya luar, serta perkembangan teknologi. Kegiatan berjudi akhirnya menjadi satu budaya dalam kehidupan masyarakat. Lalu, kebutuhan pembangunan di beberapa daerah yang akhirnya melahirkan kebijakan perizinan bagi kegiatan berjudi di Indonesia, salah satunya di Makassar kemudian menjadi fokus penelitian. Maka, dari itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kegiatan perjudian itu berlangsung di Kota Makassar serta bagaimana hasil kegiatan perjudian itu terhadap pembangunan Kota Makassar. Penulis kemudian akan membahasnya dengan mengangkat judul **“Perjudian di Kota Makassar Tahun 1967-1974”**.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penulian sejarah perlu adanya pembatasan agar pembahasan dapat terfokus pada batasan yang telah ditentukan, sehingga tulisan mendapatkan inti permasalahan yang sesuai. Batasan masalah dalam penelitian sejarah sendiri terbagi atas dua yakni batasan spasial dan temporal. Pada penelitian ini penulis memberikan batasan spasial pada satu daerah yakni Makassar. Penulis memilih Makassar karena merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan kebijakan perizinan terhadap permainan judi untuk menambah pendapatan daerah dalam mendukung impian pembangunan dalam masa Orde Baru.

Batasan temporal sendiri penulis memilih tahun 1967-1974. Karena, pada tahun 1967 keluar Surat Keputusan tentang pembentukan Loterre Totalisator cabang Makassar, meski secara resmi pelaksanaan Lotto di Makassar dimulai tahun 1968. Kemudian, penulis membatasi hingga tahun 1974 karena pada tahun itu dikeluarkan Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian oleh pemerintah Indonesia, yang menyatakan semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses lahirnya kebijakan perizinan terhadap kegiatan perjudian *Lottere Totalisator* di Kota Makassar sejak tahun 1967?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan perizinan perjudian baik dari segi pembangunan maupun terhadap masyarakat?

3. Jenis perjudian apa saja yang kembali mendapatkan perizinan di Kota Makassar sejak tahun 1970-1974?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan perizinan perjudian dipilih untuk meningkatkan pendapatan daerah guna melancarkan rencana pembangunan yang gencar digaungkan pada masa Orde Baru.
2. Untuk menjabarkan jenis-jenis perjudian apa saja yang diselenggarakan di Kota Makassar rentang tahun 1967-1974 serta bagaimana kehidupan masyarakat di tengah aktivitas perjudian yang mendapatkan perizinan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kondisi Kota Makassar dalam masa rehabilitasi pembangunan dengan menjalankan salah satu kebijakan pemungutan pajak dari perizinan perjudian rentang tahun 1967-1974.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya serta dapat memberi kontribusi pada perkembangan penelitian ilmu sejarah.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penulisan ini menggunakan beberapa jenis buku dan juga tulisan ilmiah untuk menjadi rujukan dalam menunjang penyusunan penelitian ini. Dalam hal

untuk memahami keadaan dan perkembangan Kota Makassar, penulis menggunakan beberapa buku rujukan antara lain, Buku dari Prof. Dr. Anwar Arifin dengan judul Pergulatan Politik di Makassar 1945-1966. Buku tersebut membantu penulis memahami bagaimana keadaan Kota Makassar hingga akhirnya bisa tumbuh menjadi sebuah kota yang kompleks dan plural dengan berbagai dinamika yang dilaluinya terutama dalam hal pergulatan politik dan sosial.

Kemudian, buku yang berikutnya berjudul Makassar Abad XIX : Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim oleh Edward L. Poelinggomang yang membantu penulis melihat kedudukan Makassar pada abad ke XIX. Selanjutnya, buku berjudul Menyingkap Tabir Kegelapan Fragmen Pembangunan dari M. Dg. Patompo yang menjelaskan keadaan Kota Makassar tahun 1960-an serta bagaimana rancangan Kota Makassar dalam hal rehabilitasi dan pembangunan daerah pada masa Patompo. Serta, buku dari Abdurrazak Mattaliu dengan judul Biografi perjuangan M.Dg. Patompo. Semua buku tersebut penulis gunakan untuk menggambarkan keadaan Makassar dalam tahun penelitian penulis serta membantu penulis melihat latar belakang diambilnya kebijakan perizinan Lotto di Makassar.

Mengenai pemahaman penulisan dari segi perjudian dan elemen-elemen di dalamnya penulis menggunakan buku dari Dr. Kartini Kartono berjudul Patologi Sosial Jilid 1. Dalam buku ini terdapat satu sub bab yang membahas tentang perjudian, mulai dari sejarah perjudian di Indonesia, pandangan-pandangan tentang perjudian hingga pada eksese-eksese yang ditimbulkan dari perjudian. Serta buku dari Haryanto yang berjudul Indonesia Negeri Judi. Dalam buku ini menjelaskan mengenai perjudian di Indonesia yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan

masyarakat serta membahas mengenai adanya dampak-dampak yang diakibatkan oleh judi.

Dalam hal tulisan ilmiah (skripsi) merujuk dari Rina Krisnawati dengan judul Lotere Totalisator di Surabaya 1968-1969 yang menjelaskan dinamika pelegalan judi Lotto di Surabaya dalam rangka pelaksanaan PON IV. Tulisan ini menjadi acuan yang sangat penting karena tahun tulisan ini masuk dalam batasan temporal penulis sehingga dapat menjadi pembandingan untuk penelitian penulis.

Juga terdapat skripsi yang secara khusus membahas tentang daerah Kota Makassar, yakni tulisan dari Fitri Handayani dengan judul “Legalisasi Lotto di Makassar, 1967-1969”. Berbeda dengan tulisan Fitri tersebut penulis akan menjabarkan perjudian tidak hanya Lotto namun juga perjudian pasca Lotto hingga tahun 1974. Selain itu, penulis juga telah menemukan data baru tentang Lotto itu sendiri, sehingga penelitian penulis akan menambahkan data baru dari penelitian sebelumnya. Tulisan dari Legalisasi Lotto ini akan menjadi rujukan utama dalam penelitian ini.

Untuk metode penulisan skripsi sejarah ini sendiri penulis menggunakan buku Penjelasan Sejarah dari Kuntowijoyo, serta buku Pengantar Ilmu Sejarah dari Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid. Kedua buku tersebut membantu dalam sistematika penulisan dan penelitian sejarah yang dilakukan penulis.

1.7 Metode Penelitian

Dalam kaidah ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹³ Metode dalam studi sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis secara tertulis (Garraghan 1957:33) atau suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen otentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan (Gootschalk 1986:18).¹⁴

Adapun langkah-langkah yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian sejarah ini adalah sebagai berikut :

1. Heuristik, yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang dianggap relevan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Maka, dalam proses pengumpulan data ini penulis akan melakukan pengumpulan data-data primer di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan serta Dinas Kearsipan Kota Makassar dengan mencari data yang menyangkut masalah perjudian maupun Makassar pada tahun penulisan, yakni pada Arsip Kota Ujung Pandang Volume I Tahun (1926-1988), Arsip Kotamadya Ujung Pandang Volume II Tahun (1951-1987) serta Arsip Provinsi Sulawesi Tahun 1946-1960 (Rahasia). Kemudian, mengumpulkan sumber sekunder, berupa buku yang berkaitan dan menjadi rujukan penulis yang didapatkan dari

¹³ Abdul Rahman Hamid, dan Muhammad Saleh Madjid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2011). .hlm. 40.

¹⁴ *Ibid*, hlm.43-45.

Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Multimedia, Ruang Baca Badan Arsip dan Perpustakaan Prov. Sulawesi Selatan, Perpustakaan FIS UNM. Sumber-sumber lisan didapatkan dari proses wawancara dengan orang-orang yang menjadi saksi maupun pelaku sejarah di Kota Makassar.

2. Kritik, yaitu memilah dan menyaring keotentikan sumber-sumber yang telah ditemukan. Kritik sumber terbagi menjadi dua bagian yang pertama kritik eksternal dan yang kedua kritik internal. Penulis akan memulai dengan proses eksternal untuk mengetahui kredibilitas sumber yang ditemukan baik itu huruf dalam naskah, tanda tangan bahkan sampai pada kelengkapan sumber agar kiranya semua itu sesuai dengan masanya. Lalu, melakukan kritik intern, yang lebih spesifik pada isi dari sumber untuk menyesuaikan kesamaan isi sumber dengan penelitian yang dilakukan, agar dapat mengetahui kredibilitas hubungan sumber dengan penelitian.
3. Interpretasi, yaitu memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dengan cara menghubungkan satu sama lainnya. Pada tahapan ini penulis mencoba menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian sehingga dapat membentuk suatu peristiwa yang berkesinambungan.
4. Historiografi, yaitu tahap akhir dalam penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis akan menyajikan hasil temuannya dari tiga tahap sebelumnya dengan cara menyusun dan merangkai sebuah fakta berdasarkan sumber sejarah dalam bentuk tulisan. Dengan menggunakan gaya Bahasa yang sederhana

serta tata Bahasa penulisan yang baik dan benar. agar kiranya tulisan mudah untuk dipahami dan dimengerti.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam pembahasan bab ini akan memuat beberapa bagian dari kerangka fikir untuk penelitian, antara lain latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II Makassar Dalam Arus Sejarah

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah singkat Kota Makassar untuk melihat peranan dan kedudukan Makassar hingga merdeka. Kemudian secara khusus penulis akan menjabarkan keadaan Makassar di bawah kepemimpinan M. Dg. Patompo mulai dari sosial, politik, ekonomi hingga pada kebijakan-kebijakan pentingnya selama menjabat.

BAB III Perjudian Lotere Totalisator di Kota Makassar Tahun 1967-1969

Dalam bab ketiga ini penulis akan membahas secara khusus mengenai kebijakan perizinan perjudian *Lotere Totalisator* di Kota Makassar Tahun 1967-1969. Mulai dari proses lahirnya kebijakan hingga pada elemen-elemen detail dalam permainan Lotto tersebut serta tanggapan pro dan kontra dari pihak masyarakat.

BAB IV Perjudian di Kota Makassar Tahun 1970-1974

Dalam bab penjelasan keempat ini penulis akan menjabarkan mengenai beberapa jenis perjudian yang mendapatkan perizinan setelah berakhirnya masa perjudian Lotto sejak 1969. Batasan pembahasan bab ini akan dibatasi sampai lahirnya kebijakan penertiban perjudian tahun 1974.

BAB V Kesimpulan

Dalam bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan serta sebagai inti dari permasalahan dari bab-bab sebelumnya dan menguraikan hasil-hasil temuan penulis tentang permasalahan yang dikaji pada penulisan ini.

BAB II

MAKASSAR DALAM ARUS SEJARAH

Perkembangan Kota Makassar pada masa kini tentunya tidak pernah lepas dari dinamika yang dilaluinya pada masa lalu. Posisi yang strategis menempatkan Makassar sebagai poros bagi perkembangan wilayah timur. Sejak masa kerajaan hingga masa kolonial Makassar selalu memanfaatkan pelabuhan sebagai tonggak perkembangannya. Meskipun, secara khusus daerah Makassar bukanlah daerah penghasil komoditi, namun hegemoni yang dibangun sejak masa kerajaan membuat berbagai daerah di wilayah Sulawesi Selatan menjadikan Makassar sebagai pasar utamanya. Kemudian, setelah kemerdekaan posisi Makassar tetap menjadi sentral di wilayah timur, hal itu ditandai dengan dijadikannya kota itu sebagai Ibukota NIT (Negara Indonesia Timur).

Dari waktu ke waktu Makassar kemudian tumbuh menjadi sebuah kota yang kompleks dan plural. Meskipun, perkembangannya tidak sepesat daerah-daerah lain di Jawa, namun kedudukan Makassar menjadi begitu penting sebagai daerah *periferi* dari negara Indonesia. Maka, pada bab ini penulis akan menjabarkan bagaimana kedudukan Kota Makassar sebagai pusat dari perkembangan wilayah timur. Mulai dari Makassar sebelum kemerdekaan, lalu Makassar pasca kemerdekaan hingga awal tahun 60-an, sampai pada pembahasan khusus tentang Kota Makassar serta rencana pembangunannya di era Orde Baru yang mana kala itu diprakarsai oleh walikotanya Muhammad Daeng Patompo.

2.1 Makassar Sebelum Kemerdekaan

Sejarah mencatat bahwasanya Kota Makassar mulai muncul sebagai ibukota kerajaan yang tumbuh menjadi kawasan bandar niaga setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dalam tahun 1511. Bermula dari menyatunya Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo, ekspansi besar-besaran terus dilakukan untuk memperkuat kedudukan dan hegemoni Kerajaan Makassar. Hingga tiga dekade awal abad ke-16, belum ada pusat perdagangan di Sulawesi yang pernah memainkan peran dalam percaturan internasional. Sampai pada awal abad ke-17 Makassar menjadi titik komersial sebagai basis bagi semua pihak yang sedang mencari jalan untuk menghindari usaha VOC memonopoli perdagangan rempah di Maluku.¹

Kedudukan Makassar akhirnya diambil alih oleh Kongsi Dagang VOC pasca pecahnya Perang Makassar sekitar tahun 1666-1667. Perang tersebut terjadi karena keinginan besar dari VOC untuk mengambil alih kekuasaan Kerajaan Makassar yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin demi memonopoli perdagangan rempah. Hal tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan Perjanjian Bungaya setelah dimenangkannya perang oleh VOC, yang pada dasarnya sangat menguntungkan bagi pihak VOC serta mematikan peranan Kerajaan Makassar. Kemudian, VOC yang pada saat itu dipimpin oleh Speelman menghapuskan peran kerajaan sebagai pengawas bandar niaga -sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian- dan memperkecil wilayah kerajaan hingga tidak

¹ Anthony Reid. 2009. *Pluralisme dan Kemajuan Makassar Abad ke-17*, dalam Roger Tol, (Eds.) *Usaha dan Kuasa di Masyarakat Sulawesi Selatan* terj. Innaniwa. Jakarta: KITLV-Jakarta. hlm 75.

memiliki batas perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan.² Pelabuhan Makassar kemudian dikembangkan oleh VOC dengan aturannya dan menjadikannya transit untuk pelayaran rempah-rempah dari Maluku. Makassar lantas dijadikan pos pengawasan bagi pelayaran ke bagian timur.³

Beralih ke masa setelah dibubarkannya VOC, Makassar dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa ini Makassar tetap menjadi pelabuhan yang penting di Nusantara, meskipun sempat mengalami masa krisis setelah kebangkitan pelabuhan Singapura. Namun, salah satu kebijakan “pelabuhan bebas” yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, kembali menghidupkan pelayaran dan perdagangan di pelabuhan Makassar. Pada era ini pula pengusaha Inggris dan China di Singapura semakin bergiat dalam perdagangan di Makassar, bahkan Inggris membantu meningkatkan pelayaran niaga Makassar-China.⁴

Sementara untuk kegiatan perniagaan yang terjadi di Makassar sebelum 1850 terpusat di deretan toko dan gudang yang terbentang dari utara ke selatan, yang dipisahkan oleh dua jalan yang letaknya sejajar dengan pantai, yaitu *Pasarstraat* (Jalan Pasar) dan *Chinastraat* (Jalan China). Setelah pedagang dan pengusaha membangun toko dan perusahaan di jalur *Marosstraat* (Jalan Maros) hingga ke kebun kompeni, kegiatan niaga menjadi dinamis. Kehidupan perniagaan yang makin dinamis menimbulkan urbanisasi yang mengarah pada peningkatan

² Edward L. Poelinggomang. *Makassar Abad XIX : Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2016). hlm 30.

³ *Ibid*, hlm. 31.

⁴ *Ibid*, hlm. 176.

jumlah penduduk.⁵ Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan pemerintah mengembangkan wilayah kota pada tahun 1888.

Makassar pada masa kolonial tidak hanya penting dari segi aktivitas perekonomian dan perniagaan saja, namun posisinya juga begitu penting bagi pusat pemerintahan Hindia Belanda di bagian Indonesia Timur. Hal itu sejajar dengan semakin lengkapnya perangkat birokrasi pemerintah di Kota Makassar. Tiga tahun setelah *Decentralisatiewet* 1903 diberlakukan oleh Gubernur Jendral Idenburg dan setelah penaklukan penguasa-penguasa lokal telah dilaksanakan, Makassar kemudian menjadi sebuah *Gemeente* yang berhak mengatur dan memerintah diri sendiri. Pada tahun 1918 Makassar memperoleh Walikotanya. Kemudian, dua puluh tahun kemudian, di tahun 1938, status Makassar berubah lagi menjadi Kotapraja (*Stadsgemeente*) dengan hak-hak pengaturan yang diperluas dan jumlah anggota dewan diperbanyak.⁶ Hingga kemudian kedudukan pemerintah Hindia Belanda di Kota Makassar berakhir pada tahun 1942 ketika kemudian Jepang datang dan menduduki Kota Makassar.

2.2 Makassar Pasca Kemerdekaan Hingga Tahun 1960

Menelisik keadaan Kota Makassar pasca kemerdekaan tidak akan pernah lepas dengan pergulatan politik dan sosial yang kompleks. Makassar menjadi

⁵ *Ibid.* hlm147-148

⁶ Dias Pradadimara. *Dari Makassar ke Makassar: Proses Etnisisasi Sebuah Kota*, dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy, *Kontinuitas dan perubahan dalam Sejarah Sulawesi selatan*. (Yogyakarta: Ombak, 2004). hlm. 188-189.

daerah utama dalam pergulatan di wilayah timur Indonesia. Berbagai peristiwa politik yang akhirnya berujung pada gerakan sosial terus terjadi sejak kemerdekaan hingga pada tahun 1966, atau masa Orde Baru. Dimulai dari dijadikannya Makassar sebagai ibukota Negara Indonesia Timur (NIT) sekitar tahun 1946, adanya pemberontakan Andi Azis (1950), pemberontakan Kahar Muzakkar (1951-1965), Gerakan Permesta (1957-1961), dan gerakan 30 September/PKI (1965).

Makassar setelah kemerdekaan Indonesia, tidak sepenuhnya lepas dari bayang-bayang pemerintah Belanda. Hal itu, terbukti dengan adanya Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) yang membentuk kembali pemerintahan kota dengan didirikannya Negara Indonesia Timur (NIT) yang menjadikan Makassar sebagai ibukota negara. Kedudukan Makassar kembali menjadi bagian penting dalam percatutan sejarah dibagian timur Indonesia. Hal tersebut tentunya berdampak baik bagi pengembangan Makassar itu sendiri. Berbagai fasilitas di beberapa aspek mulai dibangun seperti jalan, saluran air, pembangunan rumah, toko dan kantor.⁷ Infrastruktur menyangkut pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sarana sosial juga mulai dikerjakan.⁸ Posisi Makassar sebagai pusat pemerintahan inilah yang akhirnya membawa masyarakat Makassar pada kerangka modernitas dengan penataan kota serta sentuhan keberagaman etnis yang kemudian menghadirkan berbagai aktivitas-aktivitas kebudayaan baru.

⁷ Ilham. "Penataan Kota dan Masyarakat Perkotaan: Makassar Sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950". *Jurnal SASDAYA: Gadjah Mada Journal Of Humanities*, Vol 2 No.1, 2017. hlm. 321.

⁸ *Ibid.* hlm 323.

Bukan hanya berbicara mengenai pembangunan terhadap ibukota Makassar, pada masa NIT juga terjadi gerakan sosial yang cukup menyita perhatian pemerintah yakni pemberontakan Andi Aziz (1950). Pemberontakan ini terjadi sekitar Januari-Agustus 1950, berawal dari keputusan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk mendatangkan tentara APRIS ke Indonesia Timur yang dipusatkan di Makassar.⁹ Maka, muncullah reaksi keras dari golongan *federalisten* (orang-orang yang pro terhadap bentuk negara federal/serikat) dan anggota-anggota KNIL yang tidak setuju dengan kedatangan APRIS.¹⁰ Namun, pemberontakan yang terjadi akhirnya dapat terselesaikan pada penghujung Agustus 1950.

NIT sendiri akhirnya secara resmi berakhir pada 17 Agustus 1950 ditandai dengan meleburnya semua wilayah ke dalam Republik Indonesia. Berakhirnya riwayat NIT tidak berarti berakhir pula masa sulit. Masuknya Kahar Muzakkar ke hutan di tahun 1950 menandakan dimulainya ‘masa gerombolan’ dan mengalirnya pengungsi ke Kota Makassar. Jika di tahun 1930 penduduk kota adalah sedikit di atas 84 ribu orang, maka di tahun 1961 penduduk kota sudah menjadi lebih dari 384 ribu (Sensus Penduduk, 1961).¹¹ Kondisi ini tentunya teramat berdampak pada keadaan sosial perkotaan. Terjadi berbagai kesenjangan dalam perkembangan kota

⁹ Laessach M Pakatuwo. “Negara Boneka Belanda (Negara Indonesia Timur) 1945-1950”. *Jurnal Patingalloang: Pemikiran dan Pendidikan dan Penelitian Kesenjarahan*, Vol 5 No. 2, 2018. hlm 35.

¹⁰ *Loc.Cit.*

¹¹ Pradadimara. *Op. Cit*, hlm. 86.

akibat penambahan penduduk ini, salah satunya yakni munculnya berbagai perkampungan kumuh dipinggiran kota, serta meningkatnya tindakan kriminalitas.

Perkembangan politik di Kota Makassar juga menjadi perhatian khusus setelah selesainya masa NIT. Hal tersebut ditandai dengan berakhirnya peranan keturunan Belanda di Makassar, sebaliknya peranan orang-orang Sulawesi menjadi sangat kuat setelah adanya gerakan permesta. Dapat dikatakan bahwa sejak akhir 1950-an Makassar berada sepenuhnya di tangan orang-orang Sulawesi Selatan yang sebagian besar adalah anggota militer¹². Maka peranan militer terhadap pemerintahan di Makassar terus berlanjut hingga masa Orde Baru.

2.3 Makassar Di Bawah Pemerintahan Muhammad Daeng Patompo

2.3.1 Rezim Orde Baru dan Pembangunan Makassar

Orde Baru merupakan sebuah rezim yang lahir setelah adanya peristiwa 1965 ditandai dengan lengsernya pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak tahun 1966-1998, dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret, yang kemudian disalahartikan sebagai surat pemindahan kekuasaan. Soeharto kemudian diangkat sebagai presiden di masa ini tepatnya pada 27 Maret 1968 berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968.

Orde Baru kemudian menasbihkan diri sebagai Orde Pembangunan, selalu mendengungkan isu-isu mengenai pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan yang diusung oleh Orde Baru kemudian dirangkai menjadi sebuah

¹² Pradadimara. *Op. Cit*, hlm. 91.

konsep yang dikenal sebagai Trilogi Pembangunan. Konsep tersebut terdiri dari stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Dapat dikatakan trilogi pembangunan merupakan strategi kunci pembangunan yang dilaksanakan dalam pemerintahan Soeharto.¹³

Pada masa-masa pemerintahan tersebut prioritas utama lebih ditekankan kepada penegakan kekuatan pemerintah pusat atas birokrasi dan militer yang terbagi dan dipolitisir. Pemerintah juga melakukan langkah sentralisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya kekuatan kontrol politik pemerintah pusat atas daerah sangat dominan dan kuat.¹⁴ Tidak kalah pentingnya pula pada masa ini militer diberikan hak secara resmi untuk turut andil dalam urusan pemerintahan yang mana kemudian dikenal dengan istilah Dwifungsi ABRI. Soeharto mengemukakan “ABRI bukan semata-mata Angkatan Bersenjata bayaran, ABRI adalah juga pengisi kemerdekaan berhak dan merasa wajib ikut menentukan haluan negara dan jalannya pemerintahan. Inilah sebabnya ABRI memiliki dua fungsi (Dwifungsi) yakni sebagai alat negara dan sebagai kekuatan sosial politik”.¹⁵ Peranan militer kemudian begitu besar pada tiap-tiap sendi pelaksanaan urusan pemerintahan, tidak hanya pada pemerintahan pusat namun juga daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hegemoni pemerintahan Orde Baru yang terus tumbuh dan

¹³ Dwi Wahyono Hadi. “Propaganda Orde Baru”. *Jurnal Verleden*, Vol.1, No.1, 2012. hlm.47.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 43.

¹⁵ Abdul Syukur, dkk. *Indonesia Dalam Arus Sejarah*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012). hlm. 32.

menguat pada masa itu ditamengi oleh kekuatan ABRI serta berbagai propaganda yang disebarkan kepada masyarakat.

Sentralistik dan seragam merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan pola pemerintahan yang dilakukan pada masa Orde Baru ini, terutama dalam hal “pembangunan”. Dapat dilihat di berbagai daerah besar di Indonesia pada masa ini melakukan pembangunan dan rehabilitasi daerah dengan pesat ditengah perekonomian yang masih berada pada proses stabilisasi. Salah satunya yakni Kota Makassar, rencana pembangunan kota pada masa ini diprakarsai oleh Walikotanya yakni Patompo. Pada pelaksanaan pembangunan atau Pelita Kotamadya Ujung Pandang menganut system Kordinasi, Integrasi, Simplifikasi dan Sinkronisasi (K.I.S.S) sehingga senantiasa paralel antara Pola Pembangunan Kotamadya Ujung Pandang dan Pelita Nasional karena pusat adalah pusatnya daerah sebaliknya daerah adalah daerahnya pusat.¹⁶ Dalam pelaksanaan pembangunan di Makassar peranan militer juga cukuplah besar beberapa pembangunan jalan bahkan diprakarsai oleh militer. Dari hal inilah dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pemerintahan Orde Baru memegang kontrol yang luar biasa terhadap kekuasaannya serta rakyatnya secara menyeluruh.

2.3.2 Kondisi Geografis dan Administratif Kota Makassar

Jika kita memperhatikan peta kepulauan Indonesia, maka di pantai barat Jazariah selatan Pulau Sulawesi terdapat kota Makassar (sejak tahun 1971 hingga

¹⁶ M. Dg. Patompo. *Menyingkap Tabir Kegelapan (Fragmen Revolusi pembangunan)*. (Ujung Pandang: Percetakan SMP Frater Ujung Pandang, 1976). hlm. 30.

tahun 1999 menjadi Kota Ujung Pandang), pada koordinat 119°24'17, 38" bujur timur dan 5°8'6,19" lintang selatan. Justru ini kota bahari ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22°-32° C dan mengenal dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung bulan Oktober hingga Desember pada waktu akhir tahun dan dari bulan Januari hingga April pada awal tahun. Musim kemarau berlangsung antara bulan Mei hingga September. Curah hujan pada umumnya tinggi, yaitu 2000-3000 mm pertahun dengan hari-hari hujan rata-rata 108 hari pertahun. Arah angin 210°15' bujur timur atau arah selatan daya dengan kecepatan angin rata-rata 5.1 km dan kelembaban antara 73% - 86%.¹⁷

Kota Makassar diapit dua muara sungai yaitu Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang. Makassar yang dikenal dengan kota Anging Mamiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros di sebelah utara dan timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa serta dibagian barat dan utara dengan Pangkajene Kepulauan.¹⁸ Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Timur dengan Teluk Bone dan sebelah barat dengan Selat Makassar dan Laut Jawa. Itulah sebabnya sebagian besar ibukota kabupaten itu merupakan kota pantai.

Pada tahun 1967 Sulawesi Selatan dimekarkan menjadi 21 Kabupaten dan dua Kotamadya, dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 100.500 km².¹⁹ Berselang

¹⁷ Anwar Arifin. *Pergulatan Politik di Makassar 1946-1966*. (Tangerang Selatan: pustaka irVan,). hlm. 31.

¹⁸ *Citra Kota Makassar Dalam Arsip*. (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia)

¹⁹ Anwar Arifin. *Op. Cit*, hlm. 32.

beberapa tahun kemudian terjadi kembali perluasan wilayah Kota Makassar yakni tahun 1971. Pada tanggal 1 September 1971 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang “Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” memutuskan Daerah Kotamadya Makassar diperluas dengan memasukkan sebagian daerah dari:

1. Kabupaten Gowa yang meliputi desa : Barombong, Karuwisi, Panaikang, Tello Baru, Antang, Tamangappa, Jongaya, Rappocini, Maccini Sombala, dan Mangasa.
2. Kabupaten Maros yang meliputi desa: Bira, Daya, Tamalanrea, Bulurokeng, dan Sudiang.
3. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi desa: Barrang Caddi, Barrang Lompo, dan Perjuangan/Kodingareng.²⁰

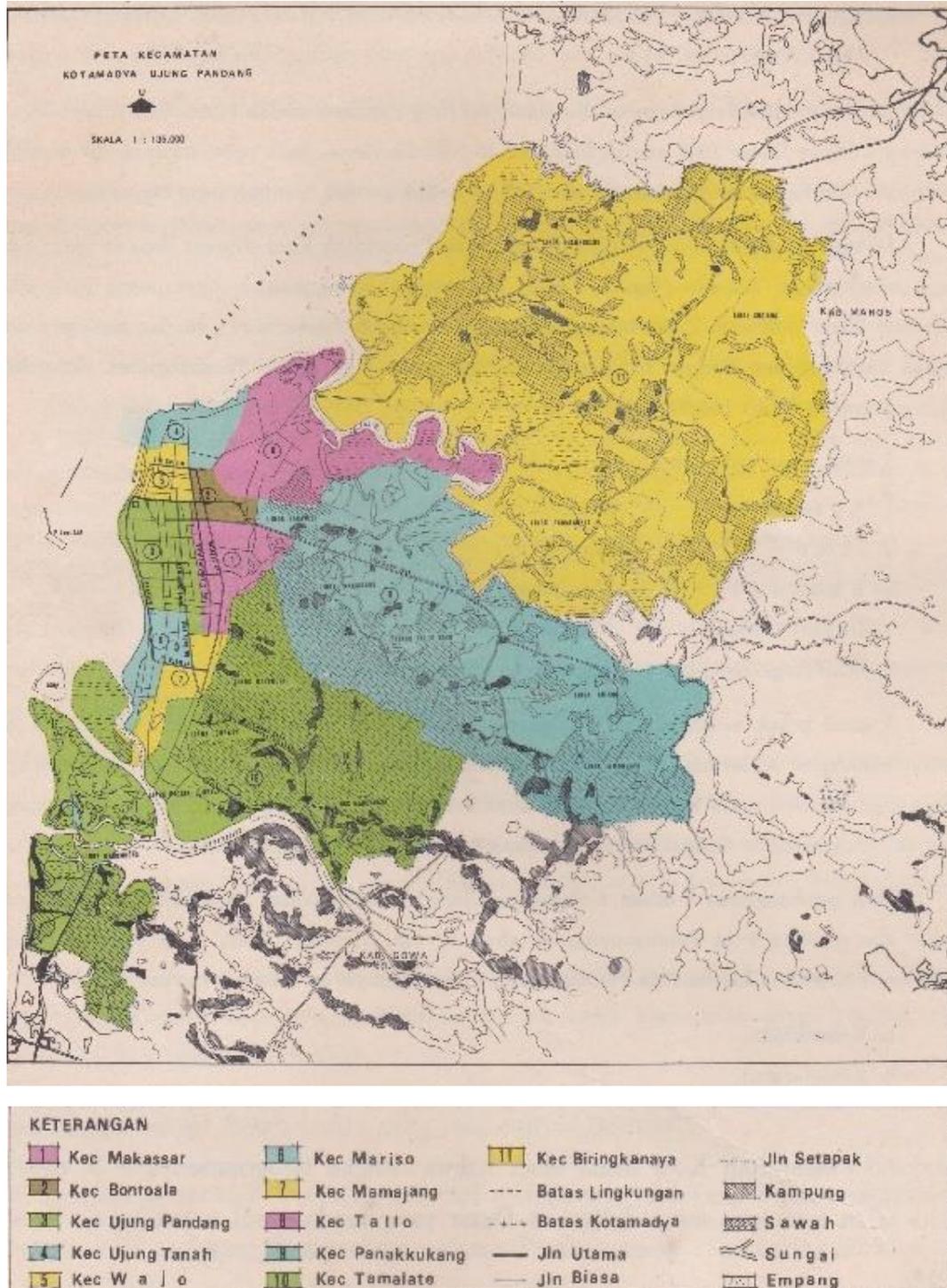
Dalam pasal 3 peraturan pemerintah No 51 tahun 1971 ini disebutkan pula bahwa “Kotamadya Makassar sesudah diperluas daerahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini dirubah namanya menjadi Kotamadya Ujung Pandang” Sejak saat itu Kotamadya Makassar berubah namanya menjadi Kotamadya Ujung Pandang.²¹

²⁰ Akhmad Akbar Abdullah. “Pepindahan karena perluasan: masuknya mangasa dalam wilayah kota makassar 1971”. *Jurnal Patingalloang* Vol. 5 No.4, 2018. hlm. 15.

²¹ Nur Kasim. *Sejarah dan Perkembangan Pemerintahan Kota Makassar*. <https://nurkasim49.blogspot.com/2011/12/i.html>, 2011. Diakses pada Sabtu, 21 November 2020 pukul 00.28.

Gambar 2.1 Peta Kotamadya Ujung Pandang Setelah Diperluas²²

Sumber : Buku.Menyingkap Tabir Kegelapan (Fragmen Revolusi pembangunan).



²² M. Dg. Patompo. *Op. Cit*, hlm 28.

2.3.3 Kondisi Ekonomi dan Penduduk Kota Makassar

Mengenai keadaan perekonomian di kota Makassar sekitar tahun 1960an sungguhlah berdampak dari segala kekacauan dan ketidakstabilan sosial politik yang terjadi di Kota Makassar sebelumnya. Hal tersebut, membuat pemerintah Kota Makassar mengalami kendala dalam hal perekonomian terutama untuk melakukan pembangunan kota. Namun, kebijakan pemungutan pajak terhadap beberapa sektor seperti pajak penginapan, losmen, penggunaan air, warung-warung, hingga transportasi merupakan pemasukan daerah yang paling utama. Kemudian, pada tahun 1970-an keluarlah instruksi dari Presiden mengenai penetapan bantuan dana pembangunan untuk setiap kabupaten dan kotamadya sebanyak 50-perkapita. Akhirnya, sedikit demi sedikit pemerintah mulai membangun Kota Makassar dari bantuan pemerintah pusat tersebut.

Data kependudukan untuk wilayah kota Makassar sendiri dapat dilihat dan ditelusuri dari berbagai sumber. Dalam penerbitan Jawatan Penerangan Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan bahwa penduduk Makassar pada tahun 1955, berjumlah 222.536 orang. Kemudian dalam laporan Walikota H. M Daeng Patompo (1966-1978) tahun 1976 tertulis bahwa penduduk kota Makassar tahun 1966 adalah 424.143 jiwa dan empat tahun kemudian 1970 bertambah menjadi 432.240 jiwa. Pada tahun 1985 jumlah penduduk Kotamadya Ujung Pandang telah mencapai 778.593 jiwa, sesuai informasi dari kantor statistik. Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka perkembangan penduduk kota Makassar mulai tahun 1947 hingga 1966 bertambah dengan cepat akibat urbanisasi.²³ Hal tersebut

²³ Arifin. *Op. Cit*, hlm. 33.

mengakibatkan banyaknya komposisi etnis yang berdiam di Kota Makassar, antaranya Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, serta beberapa etnis lain dari luar Sulawesi Selatan.

Berbagai Etnis yang membenetuk kehidupan sosial di Kota Makassar yang merupakan etnis pendatang di Kota Makassar hidup dengan berbagai jenis pekerjaan.²⁴ Pekerjaan pokok penduduk kota Makassar adalah pada bidang perdagangan dan usaha, namun ada juga variasi berdasarkan etnis²⁵. Orang-orang Makassar dan Bugis terutama orang Wajo menguasai perdagangan hasil bumi. Orang-orang Mandar selain berdagang kecil-kecilan juga banyak menjadi nelayan. Sedangkan orang Toraja lebih banyak bekerja sebagai agen polisi, pelayan took, tukang kayu, pesuruh kantor dan tukang sepatu.²⁶

Etnis lain yang berasal dari luar Sulawesi Selatan yakni pendatang yang berasal dari etnis Banjar umumnya sebagai pedagang perhiasan, tukang jahit, pedagang batu permata dan pembuat kopiah. Demikian pula orang minahsa bekerja sebagai aparat pemerintah (pegawai militer), orang-orang Sangir sebagai buruh dan pegawai kecil, orang Ambon sebagai aparat pemerintah dan juga misionaris, orang Timor sebagai buruh, orang Madura sebagai tukang pangkas rambut dan buruh, orang Tanimbar sebagai pegawai dan buruh kecil, orang Buton sebagai bru kasar dari berbagai lapangan pekerjaan seperti pembuatan jalan, dermaga dan

²⁴ Syahrudin Mansyur. "Konstruksi Baru Pameran Museum Kota Makassar". *Tesis*. (Depok: Universitas Indonesia, 2010). hlm. 103.

²⁵ *Ibid.* hlm.34.

²⁶ *Ibid.* hlm 102.

bangunan-bangunan. Sementara pendatang dari pulau Jawa umumnya membuka rumah makan khas Jawa.²⁷

Tabel 2.1 Perkembangan Penduduk Kotamadya Ujung Pandang²⁸

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
1965	415. 826 Jiwa
1966	424. 123 Jiwa
1967	432. 696 Jiwa
1968	445. 678 Jiwa
1969	450. 104 Jiwa
1970	432. 242 Jiwa
1971	553. 874 Jiwa
1972	561. 328 Jiwa
1973	564. 482 Jiwa
1974	575. 771 Jiwa
1975	587. 286 Jiwa

Sumber : Buku.*Menyingkap Tabir Kegelapan (Fragmen Revolusi pembangunan)*

2.3.4 Kebijakan-Kebijakan M. Dg. Patompo

Haji Muhammad Daeng Patompo lahir di Polewali, 16 Agustus 1926. Beliau merupakan anak kedua dari pasangan Puang Bakkidu dan Andi Besse Mappa. Ayahnya seorang pedagang besar serta keturunan bangsawan dan pemuka agama, sedangkan ibunya merupakan keturunan raja di Kerajaan Binuang, Neneknya Andi Paenrongi, ketika itu adalah raja atau selbestuur. Masa kecilnya

²⁷ *Ibid.* hlm 103-104.

²⁸ Patompo. *Op cit.* hlm. 45.

sebagian besar dihabiskan di kampung halaman, selain di Makassar sebagai tempat menuntut ilmu hingga akhir masa pendidikannya.²⁹

Pada tahun 1960 beliau sempat menjabat sebagai Kepala Sekretariat Staf Umum KODAM XIV SULSELRA, namun kemudian pada tahun berikutnya berdasarkan keputusan Gubernur Sulselra beliau diangkat menjadi anggota BPH DATI II Kotapraja Makassar. Selama menjabat sebagai BPH Teknik/Pembangunan ini patompo mulai menunjukkan ketertarikannya dalam pembangunan Kota Makassar. Berbagai kerangka dasar pembangunan telah diletakkan. Proyek-proyek pembangunan yang menyangkut kebutuhan warga telah diluncurkan. Salah satu tindakan yang paling menonjol yakni penertiban terhadap bangunan liar di Gowa-Kamp.³⁰ Namun, tak berselang lama jabatannya sebagai BPH harus berakhir karena beliau tiba-tiba mendapatkan tugas baru dari Panglima Kodam XIV Hasanuddin yakni M. Yusuf untuk membantunya pada Operasi Kilat, sebagai Dan Dim Polewali Mamasa.³¹ Setelah satu tahun mengabdikan, beliau kemudian kembali ke Makassar.

Pada tanggal 8 Mei 1965, beliau resmi dilantik sebagai Walikota Makassar yang defenitif. Di depan Sidang Pleno DPRD Kotamadya Makassar, Patompo mengucapkan pidato penerimaan jabatan dengan sukacita.³² Beliau menjabat

²⁹ Fachri Djaman. *Riwayat Dg Patompo, Sutradara Kisah Pembangunan Makassar*. <https://makassar.terkini.id/riwayat-dg-patompo-sutradara-kisah-pembangunan-makassar/>. Diakses pada Jumat, 16 oktober 2020 pukul 22.50.

³⁰ Abdurrazak Mattaliu & Andhy Pallawa. *H. M. Dg. Patompo Biografi Perjuangan*. (Yayasan Pembangunan Indonesia, 1997). hlm 39

³¹ *Ibid*, hlm. 40.

³² *Ibid*, hlm. 45.

sebagai walikota dengan keadaan Kota Makassar yang serba kekurangan. Rehabilitasi dan pembangunan kota merupakan tujuan utama yang akan Patompo jalankan, namun kendala klasik kembali menjadi hambatan yakni dana. Maka, beberapa kebijakan-kebijakan penting beliau keluarkan untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Makassar tersebut. Berbagai kendala dan rintangan dilalui pada masa pemerintahannya, namun beliau tetap dikenang sebagai perumus awal rancangan pembangunan Makassar. Meski tidak juga bisa dipungkiri bahwa beliau juga dikenang sebagai tokoh yang kontroversial. Masa jabatannya sebagai Walikota Makassar berakhir pada tahun 1978.

Selama menjabat sebagai walikota ada beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Patompo. Kebijakan Walikota Dg. Patompo sangat erat kaitannya dengan pengembangan semboyan pembangunan masa Orde Baru. Oleh karenanya, beberapa gagasan yang dikeluarkan selalu bertumpuh pada pembangunan Kota Makassar. Hal tersebut disusun dan dituangkan dalam rancangan “Pola Dasar Pembangunan Kotamadya Makassar” dengan sasaran “3K” yaitu Kemiskinan, Kebodohan, dan Kemelaratan. Dilaksanakan dalam periode yang cukup lama yakni sejak tahun 1965-1970.³³ Pada masa pemerintahan Daeng Patompo dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh dan sukses bagi kota Makassar. Setidaknya ada berbagai macam kebijakan Daeng Patompo pada masa pemerintahannya terutama

³³ *Ibid.* hlm. 47.

asalah perumahan dan pemukiman. Kebijakan tersebut antara lain: Gerakan Masuk Kampung, Lotto, Kota Satelit, Program 3 K, Masterplan.³⁴

Gambar 2.2 Penjelasan Program 3 K

Sumber: Dinas Kearsipan Kota Makassar (Media Elektronik/Cakram Padat)



Slogan memberantas kebodohan, disikapi dengan membangun gedung sekolah sebanyak mungkin. Untuk mendukung mewujudkan manusia berilmu dan sehat jasmaniah, maka didirikan sarana kesehatan di setiap kecamatan hingga lingkungan (AKUP, Vol.I, Reg.No.1469; Pedoman Rakjat, 26 Januari 1968: 1; 5 September 1968). Berbagai pihak seperti militer, swasta, lembaga donor internasional, bahkan bantuan negara lain dilibatkan dalam usaha ini (AKUP, Vol.I, Reg.No.580).³⁵ Sementara untuk sasaran pembangunan kota yang berjangka panjang yaitu sebagai kota 5 Dimensi yakni Kota Dagang, Kota Budaya, Kota

³⁴ Johan Silas. *Perjalanan Panjang Perumahan Indonesia Dalam Dan Sekitar Abad XX*. Dalam, Freek Colombijn, dkk, editor. *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota Di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005). hlm. 11-12.

³⁵ Ilham. "Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar Pada Masa Orde Baru". *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol.4 No. 1, 2019. hlm.18.

Industri, Kota Akademi, serta Kota Pariwisata, maka gerakan pembangunan makin gencar disuarakan dengan membentuk tatanan kota yang memiliki fokusnya tersendiri baik untuk perdagangan, perekonomian dan juga perumahan.

Adapun beberapa kebijakan-kebijakan yang penting pada masa pemerintahannya yang pertama yaitu Gerakan Masuk Kampung. GMK merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh Walikota Dg. Patompo setelah melihat kondisi Kota Makassar pada saat itu. Pengembangan dan modernitas yang menyentuh Kota Makassar tak juga berbanding lurus dengan segala aspek kehidupan bermasyarakat. Tentu saja kesenjangan sosial tak akan pernah lepas dari sebuah perkembangan yang mengarah lebih maju. Sama halnya, seperti perkembangan bangunan-bangunan dan fasilitas di tengah Kota Makassar yang tidaklah diimbangi dengan kelayakan tata perkampungan-perkampungan yang ada di sekitaran titik kota.

Hal tersebut memicu Walikota mengeluarkan sebuah gerakan yang diharapkan dapat meratakan pembangunan Kota Makassar. Harapan utamanya agar supaya antara pusat kota dengan kampung-kampung dapat saling memberi informasi dalam sekejap saja, jalanan, jembatan, lorong-lorong, penerangan telah tembus rata dari pusat kota ke Kampung-kampung dan pinggiran-pinggiran kota, sehingga penduduk secara merata dapat menikmati fasilitas-fasilitas kota.³⁶ Namun, secara politis gerakan masuk kampung, dilaksanakan untuk menembus kubu-kubu

³⁶ Patompo, *Op.Cit.* hlm. 85.

pertahanan anti Ideologi Pancasila khususnya Ideologi Komunis (PKI) yang mengambil travel basis kampung-kampung, sehingga sukar bagi mereka bertahan.³⁷

Kebijakan yang *kedua* yakni Master Plan. Perencanaan pembangunan ini dijalankan untuk membuat Kota Baru atau secara sederhana untuk membuat daerah desa menyentuh fasilitas perkotaan. Dalam perencanaan ini terdapat dua rancangan besar yakni Ujung Pandang Plan dan juga Panakukang Plan.

- Ujung Pandang Plan

Pemerintah Kota Makassar pada tahun 1965 mulai melaksanakan suatu pembangunan kota secara fisik pada bagian timur laut pusat kota yang dikenal dengan nama Ujung Pandang Plan atau Ujung Pandang Baru.³⁸ Pembangunan ini membuat desa yang berawa-rawa dan sangat jarang penduduknya berubah menjadi suatu Kota Baru yang ramai. Di areal ini dibangun beberapa fasilitas seperti fasilitas kesehatan (puskesmas), rumah tinggal, masjid, serta sarana Pendidikan seperti TK dan SD, juga fasilitas penunjang yakni pasar-pasar dan tempat hiburan.

- Panakukang Plan

Wilayah Panakukang direncanakan dibangun dengan 2 fungsi. Pertama, sebagai pusat pelayanan kegiatan kota maupun regional (pusat) perkantoran perdagangan, perbelanjaan, kebudayaan dan rekreasi. Kedua, sebagai tempat kediaman utama baik bagi golongan yang berpenghasilan rendah, menengah maupun tinggi. Pusat kegiatan pembangunan kota diletakkan pada pusat pertemuan

³⁷ Patompo, *Loc. Cit*,

³⁸ Patompo, *Op. Cit*, hlm. 32.

antara kegiatan-kegiatan industry pelabuhan, kota lama, perumahan baru dan rekreasi. Pusat kediaman direncanakan dalam susunan lingkungan-lingkungan atau *neighbourhood* unit.³⁹ Meskipun, pelaksanaan pembangunan hingga akhir periode pemerintahan tidak sesuai rencana awal, tetap saja gagasan ini menjadi pondasi awal pembangunan di periode selanjutnya.

Adapun kebijakan yang berikutnya yakni Lotto. Kebijakan ini merupakan salah satu yang paling komtroversial karena mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak terutama golongan agamawan. Namun, patompo berhasil menjalankan kebijakan ini dengan memperoleh pajak yang digunakan untuk melancarkan pembangunan Kota Makassar yang pada saat itu terus terkendala masalah keuangan atau dana. Banyak kalangan menyebutkan, dari hasil Lotto ini pula setiap tahun bantuan diberikan kepada badan-badan sosial, rumah-rumah ibadah, oragnisasi-organisasi kemasyarakatan serta wartawan dan penerbit pers lainnya.⁴⁰ Dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Dg. Patompo, hal yang menjadi perhatian khusus penulis yakni Kebijakan pelegalan Lottere Totalisator ini. Maka pada pembahasan selanjutnya fokus penulis akan mengarah pada kebijakan tersebut, serta kebijakan pemberian izin terhadap perjudian lainnya hingga tahun 1974.

³⁹ Patompo, *Op. Cit*, hlm. 36.

⁴⁰ Mattaliu, *Op. Cit*, hlm. 64.